



Mentalitas & Sanksi Ringan Bikin Gepeng Marak



Pengunjuk rasa dari tenaga medis dan kesehatan melakukan aksi teatrikal di depan gedung MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7).

SLEMAN—Ringannya sanksi dan mentalitas warga membuat gelandangan dan pengemis (gepeng) masih marak di sudut-sudut Kota Jogja.

Stefani Yulindriani & Catur Dwi Janati
redaksi@harianjogja.com

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY mengklaim telah menertibkan puluhan hingga ratusan gelandangan dan pengemis (gepeng) di wilayah DIY. Tidak sedikit gepeng yang kembali terjaring penertiban dan akhirnya ditindak secara hukum.

Meski sudah banyak tindakan, masih banyak gepeng yang berkeliaran di Bumi Mataram.

Perda DIY No.1/2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis sudah mengatur sanksi

► Perda DIY No.1/2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis mengatur sanksi bagi gepeng dan warga pemberi.

► Dosen Departemen Sosiologi UGM, Andreas Budi Widyanta, berpendapat fenomena mengemis tak luput dari mentalitas.

bagi gepeng dan warga pemberi. Gelandangan dan pengemis yang melanggar aturan bisa diancam hukuman kurungan paling lama enam bulan atau denda Rp10 juta hingga Rp40 juta. Adapun pemberi bisa disanksi hukuman pidana kurungan selama 10 hari atau denda paling banyak Rp1 juta.

Mentalitas &...

Namun, dalam kenyataannya sanksi yang dijatuhkan cenderung ringan. Salah satu contohnya pada November 2021, Hakim PN Sleman menjatuhkan vonis Rp50.000 kepada orang uang memberi uang Rp1.000 kepada manusia silver di Depok. Pada tahun yang sama, Satpol PP telah menangkap 10 warga pemberi uang ke pengemis dan mengajukannya ke meja hijau.

Kepala Seksi Penegakan dan Penyidikan Satpol PP DIY, Muhammad Tri Qumarul Hadi, menjelaskan selama 2022 Satpol PP DIY telah menertibkan 128 orang gepeng dari sejumlah titik di DIY. "Sejak Januari-Juli 2023 kami menerbitkan 21 orang gepeng. Dari tahun 2022-2023 telah ada lima orang gepeng yang ditangkap ketiga kalinya sehingga dibawa ke ranah hukum," kata Qumarul Hadi, Selasa (11/7).

Kepala Satpol PP Sleman, Shavitri Nurmala Dewi, mengungkapkan ada indikasi para gepeng kini terorganisasi. "Iya, ada indikasi ke situ memang," ungkapnya.

Rata-rata para gepeng yang ditangkap berasal dari luar DIY. Beberapa yang pernah tertangkap ada yang berasal dari Klaten, Magelang dan Jawa Timur. "Mereka enggak kerja sendiri," lanjutnya.

Menurut pengalaman Evie, pernah ada pengemis yang ditangkap karena mengaku kehabisan uang. Akhirnya petugas memulangkan pengemis tersebut ke Magelang. "Jadi kami manusiawi enggak kemudian tanpa solusi," ungkapnya.

Evie menandai pada setiap Jumat akan ada banyak manusia gerobak yang mangkal di jalan utara Fakultas Biologi UGM. Mereka mengharapkan Jumat Barokah. Padahal ketika diamati, setelah mengumpulkan bantuan, mereka pulang menggunakan motor.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) DIY, Endang Patmintersih, menambahkan puluhan hingga ratusan gepeng yang terjaring penerbitan diserahkan kepada Dinsos untuk asesmen.

Dari asesmen tersebut, akan digali asal daerah gepeng tersebut melalui KTP yang dimiliki. Jika memiliki KTP, gepeng akan dikembalikan ke keluarga mereka atau daerah

asalnya.

Sebaliknya, jika tidak memiliki keluarga dan tidak memiliki KTP, gepeng mereka akan direhabilitasi oleh Dinsos DIY melalui Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (BRBSKL) Yogyakarta.

"Berdasarkan data Dinsos DIY jumlah gepeng yang ditangani di BRBSKL Yogyakarta setiap tahunnya sejak 2015 hingga 2021, rata-rata 50 orang per tahun. Pada tahun 2022 dan 2023 ada sebanyak 40 orang gepeng yang direhabilitasi," kata Endang Patmintersih.

Selama di BRBSKL, kata Endang, warga binaan (gepeng) diberi rehabilitasi sosial, mental, dan pendampingan agar tidak kembali ke jalanan. Dinsos juga bekerja sama dengan Disnakertrans DIY untuk membekali warga binaan dengan keterampilan dan kesempatan untuk mengikuti program transmigrasi.

Endang bercerita, beberapa waktu lalu Dinsos DIY melakukan asesmen kepada manusia gerobak. Mereka terungkap memiliki uang hingga Rp25 juta. "Itu pendapatan mereka mengemis (selama beberapa bulan). Belum lama (waktu temuannya), tapi itu juga orang luar Jogja. Maka kami kembalikan ke keluarganya," katanya.

Menurut Endang, masyarakat Jogja tergolong muraah hati atau *loma* sehingga gepeng yang berkeliaran pendapatannya tergolong tinggi. "Maka ini (gepeng) yang masuk Jogja orang dari mana-mana, mungkin karena Jogja orangnya *loma*, enggak tegaan, ini yang harus kami edukasi bahwa memberi itu tidak di jalan. Kalau tidak ada yang memberi, pengemis kan juga tidak ada," imbuhnya.

Dia pun mengimbau agar masyarakat tidak memberikan uang kepada gepeng di jalanan. Menurutnya, Perda DIY No.1/2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis telah mengatur larangan memberikan uang atau barang dalam bentuk apapun kepada gepeng.

Tak Mau Kerja

Sementara itu, dosen Departemen Sosiologi UGM, Andreas Budi Widyanta, berpendapat fenomena mengemis tak luput dari mentalitas. "Ini kan mentalitas. Mentalitas orang yang enggak mau bekerja," katanya.

Sayangnya, pembangunan karakter manusia yang giat bekerja ini menjadi problem kebudayaan saat ini. "Membangun karakter manusia yang mau giat bekerja ini problem kebudayaan besar kita dan ini perlu pembentukan tata nilai, pembentukan karakter manusia yang punya rasa malu," ujarnya.

Abe beranggapan mengemis merupakan tindakan orang yang tidak punya rasa malu. Mereka, para pengemis, mengandalkan rasa iba, menjadikan usaha meminta-minta sebagai usaha manipulatif yang ternyata mereka sendiri bergelimang harta. Bila diteliti lebih lanjut, Abe mengungkapkan ada pengemis yang membawa anak untuk meminta-minta. Namun acap kali ternyata anak yang dibawanya untuk mengemis bukan anaknya, melainkan anak orang lain yang dipinjam untuk mengemis.

"Bahwa itu adalah kelompok-kelompok orang yang terorganisasi untuk melakukan model menjadi pengemis, yang sebetulnya lalu memanfaatkan untuk bisa menggali keuntungan dari menjual rasa iba dari masyarakat. Organisasi ini tentu perlu diteliti lebih lanjut, perlu kajian yang lebih komprehensif," katanya.

Di sisi lain, Abe juga menyinggung kesadaran masyarakat untuk tidak mudah memberikan uang dengan dalih rasa iba semata tanpa tahu latar belakang peminta-minta. Sebab, para pemberi tidak bisa tahu apakah para pengemis memang betul-betul membutuhkan atau tidak. Sementara di daerah lainnya ada pengemis yang menggunakan uangnya untuk menyewa jasa LC atau manusia silver yang menggunakan uangnya untuk menyewa jasa open BO.

Sementara, di lain pihak, dari kacamata Abe ada banyak lembaga yang justru membutuhkan uluran tangan para dermawan tetapi luput atau justru jarang disambangi.

"Atau misalnya justru menjadi semacam *foster parent*, bapak angkat. Kenapa itu tidak dilakukan ketimbang hanya memberi secara acak setiap pengemis yang meminta-minta kepada kita," katanya.

Butuh sikap yang tegas untuk tidak memberi bantuan ke peminta-minta.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005